
Analisis Kepemimpinan Dalam Pembinaan Koperasi Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Prabumulih

Analysis of leadership in the development of cooperatives at the Department of Cooperatives and SMEs Prabumulih

Welamsyah¹⁾, Raniasa Putra²⁾ & Novita Wulandari¹⁾*

1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Pascasarjana, Universitas Tamansiswa Palembang, Indonesia

2) Universitas Sriwijaya, Indonesia

*Corresponding Email: wulanrhendhu@gmail.com

Abstrak

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepemimpinan terhadap pembinaan koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Prabumulih serta menganalisis kepemimpinan terhadap pembinaan koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Prabumulih, serta. Data-data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam pembinaan koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Kota Prabumulih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya kesadaran anggota, partisipasi yang kurang, kesulitan menegakkan disiplin, kurangnya jiwa kewirausahaan, regulasi yang tidak memadai, birokrasi kompleks, akses terbatas terhadap dana, pemasaran yang kurang efektif, dan kendala perijinan. Diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah daerah, organisasi pendukung, dan anggota koperasi untuk mendukung pertumbuhan koperasi sebagai pilar ekonomi lokal yang kuat. Pembinaan koperasi perlu memperkuat pendidikan dan pelatihan, fokus pada manajemen, permodalan, dan action research, serta memperbaiki kolaborasi dengan stakeholder eksternal untuk mendukung usaha kecil olahan pangan di Kota Prabumulih.

Kata kunci: Kepemimpinan; Pembinaan; Koperasi.

Abstract

This article or writing aims to analyze what factors influence leadership towards cooperative development at the Prabumulih City Cooperatives and SMEs Service and to analyze leadership towards cooperative development at the Prabumulih City Cooperatives and SMEs Service, as well. Data was collected through interviews, observation, and documentation, while data analysis techniques used interactive analysis techniques. The research results show that leadership in cooperative development at the Prabumulih City Cooperative and SME Department faces various challenges, including low member awareness, lack of participation, difficulty enforcing discipline, lack of entrepreneurial spirit, inadequate regulations, complex bureaucracy, limited access to funds, less effective marketing, and licensing constraints. Strategic steps are needed from local governments, supporting organizations, and cooperative members to support the growth of cooperatives as pillars of a strong local economy. Cooperative development needs to strengthen education and training, focus on management, capital and action research, as well as improve collaboration with external stakeholders to support small food processing businesses in Prabumulih City.

Keywords: Leadership; Coaching; And Cooperative.

How to Cite: Welamsyah. Putra, R. Wulandari, N. (2023). Analisis Kepemimpinan Dalam Pembinaan Koperasi Pada Dinas Koperasi dan Ukm Kota Prabumulih. *Journal of Law & Policy Review*. 1 (1): 96-104.



PENDAHULUAN

Era globalisasi dan situasi new normal pandemi COVID-19 telah mendorong perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara bekerja, berinteraksi, dan mengakses layanan. Di tengah ketidakpastian dan tantangan yang muncul, teknologi informasi dan komunikasi menjadi pilar utama dalam menjaga kelangsungan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Digitalisasi yang semakin meluas telah memungkinkan adaptasi cepat terhadap kondisi yang berubah, mendukung kerja dari rumah, pembelajaran daring, dan pelayanan publik berbasis online. Selain itu, kolaborasi global dalam penelitian, distribusi vaksin, dan kebijakan kesehatan menekankan pentingnya solidaritas dan kerjasama internasional untuk menghadapi krisis ini secara efektif (Kusmanto et al., 2020; Pranata et al., 2021; Samrah et al., 2021; Suharyanto et al., 2021).

Era globalisasi dan situasi new normal pandemi COVID-19 saat ini mengharuskan pemerintah untuk menjaga stabilitas perkembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (Dwiparma et al., 2022; Sarjana et al., 2021) Kepedulian terhadap UMKM menjadi stimulus yang baik dan sehat serta berdampak positif pada identitas bangsa Indonesia (Maulana & Atmojo, 2023). Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Ramdani & Febriasari, 2018). Upaya yang ditempuh guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat meliputi peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Tarigan et al., 2019).

Jumlah koperasi di Kota Prabumulih menunjukkan tren yang bervariasi di setiap kecamatan. Data dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Prabumulih tahun 2020 menunjukkan bahwa Kecamatan Prabumulih Timur memiliki jumlah koperasi tertinggi pada tahun 2019, yaitu sebanyak 67 koperasi. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya sejak tahun 2017. Sebaliknya, Kecamatan Rampang Kapak Tengah memiliki jumlah koperasi terendah, yaitu sebanyak 10 koperasi pada tahun 2019, dan tidak mengalami peningkatan sejak tahun 2017. Jumlah koperasi yang bervariasi ini menunjukkan adanya perbedaan dinamika ekonomi di setiap kecamatan dan menggambarkan kebutuhan akan pembinaan koperasi yang lebih intensif di beberapa wilayah.

Sektor usaha kecil dan informal telah terbukti berperan strategis dalam mengatasi dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 (Isnaini & Barus, 2015). Sektor ini tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Usaha kecil dan informal memiliki beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar dan menengah, seperti kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, memanfaatkan sumber daya lokal, serta fleksibilitas dalam menghadapi perubahan ekonomi (Nyxedanovya & Inayah, 2018)(2019). Namun, sektor ini juga menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek permodalan, manajemen usaha, dan kualitas sumber daya manusia. Kesulitan akses terhadap informasi dan sumber daya produktif seperti modal dan teknologi juga menjadi hambatan bagi perkembangan usaha kecil (Polnaya & Darwanto, 2015).

Jumlah UKM di Kota Prabumulih juga menunjukkan variasi yang signifikan di setiap kecamatan. Data tahun 2020 dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Prabumulih menunjukkan bahwa Kecamatan Prabumulih Utara memiliki jumlah UKM tertinggi pada tahun 2019, yaitu sebanyak 2.765 UKM, sedangkan Kecamatan Prabumulih Barat memiliki jumlah UKM terendah, yaitu sebanyak 365 UKM. Peningkatan jumlah UKM yang signifikan di beberapa kecamatan mencerminkan adanya potensi besar untuk pengembangan usaha kecil di wilayah tersebut. Namun, masih ada kendala yang harus diatasi, seperti akses terhadap permodalan, informasi, dan teknologi.

Melihat peran strategis UMKM dan kendala yang dihadapi, pengembangan usaha kecil menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat (Sudaryanto

& Wijayanti, 2013)(2020). Untuk mendukung pengembangan ini, diperlukan informasi yang lengkap, mudah, dan cepat diakses mengenai potensi sektor usaha ekonomi atau komoditas tertentu untuk dikembangkan di suatu wilayah (Limbong, 2023). Informasi tersebut dapat mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan usaha kecil, serta prospek pengembangan program kemitraan terpadu untuk sektor usaha atau komoditas tersebut (Nur Syam et al., 2022). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia tidak lagi memberikan bantuan kredit secara langsung kepada usaha kecil, namun tetap mengambil kebijakan untuk membantu dan mendorong pengembangan usaha kecil melalui bantuan teknis dan penyediaan informasi melalui Sistem Informasi Pengembangan Usaha Kecil (SIPUK) (Indonesia, 1999). Salah satu subsistem dari SIPUK adalah Sistem Informasi Bisnis (SIB) yang menyajikan informasi tentang potensi dan identifikasi peluang investasi (Syaiful, 2016).

Program kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Prabumulih telah melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anggota/pengurus koperasi dan UKM, masyarakat umum, siswa SD, SMP, SMA sederajat hingga perguruan tinggi. Program-program tersebut mencakup promosi dan pengembangan sarana dan prasarana pemasaran produk, peningkatan kemampuan manajemen koperasi, sosialisasi koperasi di sekolah, pelatihan koperasi berbasis syariah, pelatihan penguatan simpan pinjam, dan sosialisasi koperasi kepada pedagang kuliner. Selain itu, terdapat juga program pelatihan peningkatan kualitas pengurus dan pengelola koperasi, pelatihan laporan keuangan koperasi, kegiatan HUT koperasi, pelatihan budidaya dan pengolahan karet, pelatihan pembuatan kain jumputan, sosialisasi koperasi wanita, pembinaan UKM, serta pembinaan, monitoring, dan pemutakhiran data.

Pentingnya peran kepemimpinan dalam pembinaan koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Kota Prabumulih tidak dapat diabaikan. Kepemimpinan yang efektif dapat memberikan arahan yang jelas, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, dan memotivasi anggota koperasi untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama (Nugraha, 2022). Selain itu, kepemimpinan yang baik juga mampu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi koperasi, seperti permasalahan permodalan, manajemen usaha, dan kualitas sumber daya manusia (Saragih et al., 2019).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 sangat relevan dan berpengaruh terhadap pembinaan koperasi di Kota Prabumulih. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, dan kekhasan daerah dalam sistem NKRI (RAZAK & others, 2018). Sementara itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 mengubah peran Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan usaha kecil, dengan fokus pada bantuan teknis dan penyediaan informasi melalui Sistem Informasi Pengembangan Usaha Kecil (SIPUK) (Indonesia, 1999). Kedua undang-undang ini memberikan kerangka kerja dan pedoman bagi pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam mendukung dan mengembangkan usaha kecil dan koperasi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan dalam pembinaan koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Kota Prabumulih, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dinamika kepemimpinan dalam pembinaan koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Kota Prabumulih. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara mendalam implementasi kepemimpinan dalam konteks alami (Pinayungan & Isnaini, 2018). Informan penelitian dipilih secara purposive berdasarkan relevansi dengan tujuan penelitian, termasuk Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Prabumulih, lima pengelola koperasi, dan sepuluh nasabah koperasi.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan Kepala Dinas tentang kebijakan dan strategi pembinaan, serta wawancara dengan pengelola koperasi dan nasabah untuk menggali pengalaman terkait kepemimpinan dan operasional koperasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh konteks sosial dan budaya koperasi dari aktivitas lapangan. Dokumentasi mencakup laporan tahunan, program kerja, dan catatan rapat yang mendukung temuan dari wawancara dan observasi.

Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber dan disusun berdasarkan kategori relevan. Penyajian data dalam bentuk matriks atau diagram membantu mengidentifikasi pola dan hubungan antar-kategori. Kesimpulan ditarik berdasarkan analisis interaktif yang berulang terhadap temuan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemimpinan Terhadap Pembinaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Prabumulih

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Prabumulih 2021 menunjukkan bahwa Kecamatan Prabumulih Timur memiliki jumlah koperasi terbanyak dengan 71 unit, sementara Kecamatan Rambang Kapak Tengah memiliki jumlah koperasi terendah, yaitu 10 unit. Berdasarkan datayang didapatkan menunjukkan tren jumlah koperasi aktif dari tahun 2016 hingga 2019, menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun dengan jumlah koperasi aktif mencapai 171 pada tahun 2019, menunjukkan upaya yang dilakukan untuk memperkuat sektor koperasi di Kota Prabumulih.

Hasil penelitian teridentifikasi beberapa permasalahan utama dalam pembinaan koperasi di Kota Prabumulih. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh koperasi di Kota Prabumulih adalah rendahnya kesadaran anggota terhadap peran aktif dalam koperasi. Ini mencakup pemahaman akan tujuan koperasi, hak dan kewajiban anggota, serta manfaat jangka panjang dari keanggotaan. Banyak anggota koperasi belum sepenuhnya menyadari potensi koperasi sebagai alat ekonomi kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan komunitas.

Partisipasi anggota juga krusial bagi keberhasilan operasional koperasi. Partisipasi aktif memungkinkan anggota untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, pengembangan produk atau layanan, serta kegiatan sosial dan ekonomi koperasi. Namun, di Kota Prabumulih, terdapat tantangan dalam mendorong partisipasi aktif anggota, baik karena kurangnya kesempatan atau motivasi yang rendah.

Kedisiplinan adalah landasan penting dalam menjaga integritas dan efisiensi operasional koperasi. Banyak koperasi di Kota Prabumulih menghadapi tantangan dalam menegakkan disiplin di antara anggotanya, yang dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap aturan, penurunan kinerja, dan kesulitan mencapai tujuan organisasional.

Jiwa kewirausahaan menjadi faktor penting dalam kemampuan koperasi untuk mengidentifikasi peluang, mengambil risiko yang diperlukan, dan mengelola sumber daya dengan efektif. Kurangnya pengembangan jiwa kewirausahaan di antara anggota koperasi di Kota Prabumulih dapat menghambat kemampuan mereka untuk bersaing dalam pasar yang kompetitif.

Keterampilan anggota koperasi juga sangat menentukan dalam keberhasilan operasional mereka. Ini termasuk pengetahuan teknis terkait usaha koperasi, manajemen keuangan, pemasaran, dan kemampuan interpersonal untuk berinteraksi dengan baik. Di Kota Prabumulih, ada kebutuhan yang besar untuk meningkatkan keterampilan ini agar anggota koperasi dapat lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan koperasi.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi, kedisiplinan, jiwa kewirausahaan, dan keterampilan anggota koperasi di Kota Prabumulih. Diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dari pemerintah daerah, organisasi pendukung, dan anggota koperasi sendiri untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan koperasi sebagai pilar ekonomi lokal yang kuat dan berkelanjutan.

Regulasi terkait koperasi di Kota Prabumulih, yang seharusnya menjadi landasan hukum untuk mengatur operasional dan manajemen koperasi, sering kali tidak memadai. Hal ini terbukti dari data studi yang menunjukkan bahwa banyak regulasi yang belum bisa mengakomodasi kebutuhan dan dinamika unik dari setiap koperasi. Akibatnya, koperasi menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam menjalankan kegiatan mereka dengan efektif dan berkelanjutan.

Regulasi yang kaku dan tidak fleksibel sering kali menghasilkan birokrasi yang berlebihan. Proses birokratis yang rumit dan memakan waktu dapat menghambat koperasi dalam pengambilan keputusan dan implementasi. Misalnya, proses perizinan atau izin usaha yang berbelit-belit dapat sangat memperlambat kemampuan koperasi untuk memulai atau memperluas usaha mereka.

Ketidajelasan dalam interpretasi atau implementasi regulasi juga sering kali menciptakan ketidakpastian hukum bagi koperasi. Hal ini dapat menghambat koperasi untuk berinovasi atau melakukan investasi jangka panjang karena khawatir tentang konsekuensi hukum yang tidak diinginkan di masa depan.

Selain itu, regulasi yang tidak memadai juga dapat menghambat koperasi untuk beradaptasi dengan perubahan pasar atau kondisi ekonomi yang dinamis. Koperasi yang terjebak dalam birokrasi yang berat cenderung kurang responsif terhadap peluang pasar yang muncul atau tantangan mendesak, yang berdampak negatif pada kemampuan mereka untuk bersaing secara efektif di tingkat lokal maupun regional.

Negara atau wilayah dengan regulasi yang lebih adaptif umumnya melihat pertumbuhan yang lebih baik dalam sektor koperasi. Mereka mampu mengakomodasi kebutuhan koperasi dengan lebih baik, mendorong inovasi dan investasi yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa regulasi yang lebih maju dapat membantu memanfaatkan penuh potensi koperasi sebagai alat ekonomi untuk pengembangan lokal dan pengentasan kemiskinan.

Di Kota Prabumulih, koperasi juga menghadapi tantangan dalam mengakses sumber dana yang diperlukan untuk mendukung operasional sehari-hari serta untuk melakukan ekspansi usaha. Keterbatasan akses ke kredit dari bank-bank lokal sering kali menjadi masalah utama. Persyaratan yang ketat, seperti jaminan yang cukup atau laporan keuangan yang lengkap, sering kali tidak dapat dipenuhi oleh koperasi, menghambat kemampuan mereka untuk mendapatkan pinjaman yang diperlukan.

Lembaga keuangan sering kali juga menganggap koperasi sebagai entitas yang lebih berisiko dibandingkan dengan bisnis besar lainnya. Hal ini dapat membuat mereka enggan untuk memberikan pinjaman, terutama jika koperasi tidak memiliki catatan kredit yang kuat atau jaminan yang memadai.

Alternatif pembiayaan seperti kredit mikro atau modal ventura juga tidak selalu tersedia atau mudah diakses oleh koperasi di Kota Prabumulih. Keterbatasan ini mempersempit opsi koperasi dalam mencari sumber dana tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha atau mengatasi masalah keuangan mendesak.

Kurangnya sistematisasi dalam administrasi koperasi di Kota Prabumulih dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk penundaan dalam pengambilan keputusan, pengarsipan yang tidak teratur, dan kesulitan dalam memantau kinerja secara menyeluruh. Dampak dari kondisi ini tidak hanya menghambat efisiensi operasional, tetapi juga meningkatkan risiko kehilangan data atau informasi penting. Selain itu, pengelolaan keuangan yang tidak teratur dapat menyulitkan koperasi dalam merencanakan arus kas, menghitung laba rugi dengan akurat, dan membuat keputusan investasi yang tepat waktu.

Pemasaran dan perijinan usaha merupakan dua aspek krusial yang juga sering menjadi kendala bagi koperasi di Kota Prabumulih. Pemasaran yang efektif sangat penting untuk meningkatkan visibilitas produk, mencapai pasar yang lebih luas, dan meningkatkan penjualan. Namun, kurangnya strategi pemasaran yang terencana dengan baik serta keterbatasan akses

terhadap jaringan distribusi dapat membuat koperasi kesulitan untuk bersaing dengan perusahaan besar atau merek yang sudah mapan.

Di sisi lain, perijinan usaha juga memiliki peran yang sangat penting. Proses yang rumit dan memakan waktu dalam mendapatkan izin dari pemerintah daerah atau lembaga terkait sering kali menjadi penghalang bagi koperasi untuk segera memulai atau mengembangkan usaha mereka. Ketidajelasan dalam regulasi atau interpretasi yang berubah-ubah dari waktu ke waktu juga dapat menambah ketidakpastian hukum bagi koperasi, yang dapat menghambat rencana investasi atau ekspansi usaha mereka.

Kemandirian koperasi dalam arti memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelola operasional secara mandiri sering kali menjadi masalah serius. Ketergantungan pada bantuan eksternal, baik dari pemerintah atau organisasi lainnya, dapat membatasi kemampuan koperasi untuk mengambil keputusan secara independen atau mengembangkan kegiatan usaha yang inovatif. Keterbatasan ini juga dapat membatasi fleksibilitas koperasi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi pasar atau kebijakan ekonomi yang baru.

Analisis Kepemimpinan terhadap pembinaan koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Prabumulih

Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi kepemimpinan terhadap pembinaan koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Prabumulih maka perlu peran individu dan organisasi untuk menopang pembinaan yang berbasis kinerja. Peneliti mengadopsi teori Hamalik dan Thoha (Sulistia & Suparman, 2019), sebagai acuan pembinaan serta strategi pembinaan yang baik seperti apa, dengan demikian penulis dapat mengukur bagaimana peranan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kota Prabumulih. Adapun untuk mencapai pembinaan yang baik diperlukan strategi pembinaan guna mencapai hasil yang diinginkan. Strategi pembinaan terdiri dari: Pendidikan dan Latihan (Diklat), Penekanan pada Manajemen, Aspek Permodalan dan *Action Research*

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan upaya penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Diperlukan bimbingan dari profesional dalam bidangnya untuk mencapai hasil yang optimal dalam pekerjaan atau tugas. Unsur pelatihan ini melibatkan berbagai elemen kunci seperti pengelola diklat, tenaga pelatih (Widyaiswara), peserta pelatihan, masyarakat, konsultan, dan tenaga ahli pendidikan. Program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM melalui Unit Pelayanan Dinas Terpadu (UPTD) Badan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi (Badiklatkop) mencakup berbagai jenis pelatihan, termasuk pelatihan bagi pengelola koperasi, uji kompetensi untuk manajer koperasi, kasir, juru buku, dan e-commerce. Pentingnya pembinaan ini terlihat dari dukungan tenaga profesional yang telah tersertifikasi dalam bidangnya dan pengadaan sarana prasarana yang memadai seperti kelas pelatihan, fasilitas makan, dan pemberian sertifikat bagi yang lulus uji kompetensi. Finansial untuk program ini berasal dari APBD dengan penggantian biaya transportasi untuk peserta diklat, sementara dukungan lingkungan dari masyarakat dan pemerintah setempat juga turut mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ini meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan penulis dilapangan tersebut, Program yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dinas telah terlaksana, dalam hal ini sesuai dengan fungsi manajemen, karena program yang dibuat dan dijalankan mempunyai SOM (Standar Operasional Manajemen). hasil penelitian program-program yang dibuat tiap bidang Dinas Koperasi dan UKM untuk perbaikan sumber daya manusia koperasi dalam hal manajemen sudah baik yakni menyentuh aspek perencanaan dengan adanya bagian perencanaan sebelum membuat program dan melaksanakan berbagai bentuk program, seperti penyuluhan, bintek, advokasi, sosialisasi, bimbingan untuk koperasi yang membutuhkan bantuan, menegur sampai memanggil koperasi yang bermasalah baik untuk anggota dan pengurus koperasi.

Aspek permodalan yang dibantu oleh pemerintah yang telah terlaksana saat ini adalah menyediakan kebijakan-kebijakan, pelatihan dan hibah non uang seperti komputer, program



aplikasi akuntansi dan sebagainya. Namun untuk sekarang dibolehkan hanya hibah uang, karena bisa menjadi aset jika suatu saat koperasi tersebut tidak berjalan. Untuk hibah terbagi dalam dua bagian, yakni hibah bank dan non bank, hibah bank berbentuk kredit seperti dana KUR. Koperasi dapat mengajukan kredit ke bank dengan dibantu subsidi oleh pemerintah sebesar 7% melalui bank. Untuk hibah non bank, bisa melalui LPDB atau UMi, sistem pendaftarannya melalui online nanti diverifikasi (RKPD online) dan biasanya akan mendapat NIK sebagai bentuk kelayakan mendapat hibah.

Action research adalah istilah untuk menamakan suatu riset yang diikuti dengan suatu tindakan pelaksanaan dari hasil-hasil yang disebutkan dalam riset tersebut (Sulistia & Suparman, 2019). Model yang dapat diterapkan dalam action research adalah identifikasi masalah, konsultasi dengan ahli ilmu perilaku, pengumpulan data dan diagnose awal oleh konsultan, umpan balik kepada klien atau kelompok, diagnose bersama terhadap masalah, tindakan (*action*), pengumpulan data setelah fase tindakan. Pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Prabumulih ada yang tidak melakukan post test, tidak ada pembinaan dan pemantauan atau monitoring kembali setelah fase pembinaan yang telah diberikan. Dan dari hasil wawancara terhadap koperasi juga terdapat koperasi yang tidak mengikuti prinsip-prinsip koperasi, seperti menetapkan bunga yang tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan usaha industri kecil olahan pangan di Kota Prabumulih perlu ditingkatkan dalam efektivitasnya. Dinas Koperasi dan UKM Kota Prabumulih telah memberikan respons dengan program pelatihan teknis, manajemen kewirausahaan, dan penyediaan peralatan produksi kepada para usahawan. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya dukungan modal dan izin legalitas produk dari instansi teknis seperti Dinas Kesehatan dan Badan POM, sehingga usaha-usaha kecil ini membutuhkan perlindungan lebih besar untuk berkembang signifikan.

Pelibatan masyarakat dalam pembinaan usaha olahan pangan di Kota Prabumulih menunjukkan perlunya koordinasi dan komitmen yang lebih baik dari Pemerintah Daerah. Meskipun sudah ada upaya melalui forum Musrenbang dan motivasi untuk menjaga kualitas produk, pelaku usaha masih menghadapi tantangan perizinan dan perlindungan produk. Dukungan yang lebih menyeluruh dari Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan solusi berkelanjutan bagi pengembangan usaha kecil.

Kolaborasi antara Dinas Koperasi dan UKM Kota Prabumulih dengan stakeholder eksternal seperti bank, Badan POM, dan Dinas Kesehatan masih belum optimal dalam mendukung pengusaha kecil olahan pangan. Meskipun telah ada upaya sosialisasi permodalan dan bantuan pengurusan izin, pelaku usaha masih terkendala oleh ketidakpastian modal dan biaya pengurusan izin yang tinggi. Diperlukan komitmen dan integrasi yang lebih kuat antar lembaga terkait untuk memastikan pembinaan usaha kecil olahan pangan dapat berjalan efektif.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Prabumulih telah melakukan berbagai kegiatan untuk pengembangan UMKM sesuai dengan Rencana Strategis Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah serta Program Pendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kegiatan tersebut meliputi pelatihan pengembangan usaha, pameran produk UMKM, legalisasi usaha, dan permodalan. Meskipun demikian, kuota pelatihan masih terbatas. Selain itu misi dan visi organisasi digunakan sebagai motivasi pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM, dengan dukungan jaminan dan gaji yang memadai. Adaptasi terhadap perubahan eksternal disesuaikan dengan Rencana Strategis Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meskipun beberapa pegawai masih menghadapi kendala dalam menguasai teknologi dan beradaptasi dengan lingkungan luar. Dalam hal penyampaian informasi, dinas mengikuti Rencana Strategis Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif melalui sosialisasi, pembuatan brosur, dan pengumuman di website dinas.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang kepemimpinan dalam pembinaan koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Kota Prabumulih, terdapat beberapa tantangan signifikan. Meskipun jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2019, masalah utama termasuk rendahnya kesadaran anggota, partisipasi yang kurang, kesulitan dalam menegakkan disiplin, kurangnya jiwa kewirausahaan, dan kebutuhan akan keterampilan yang lebih baik. Selain itu, regulasi yang tidak memadai, birokrasi kompleks, akses terbatas terhadap dana, pemasaran yang kurang efektif, dan kendala perijinan juga menjadi hambatan serius. Perlunya langkah-langkah strategis holistik dari pemerintah daerah, organisasi pendukung, dan anggota koperasi untuk mendukung pertumbuhan koperasi sebagai pilar ekonomi lokal yang kuat.

Berdasarkan analisis kepemimpinan dalam pembinaan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Prabumulih, strategi pembinaan seperti pendidikan dan pelatihan (Diklat), fokus pada manajemen, permodalan, dan action research menjadi krusial. Meskipun telah dilakukan program-program seperti pelatihan teknis dan manajemen kewirausahaan, tetap terdapat kendala seperti dukungan modal dan izin produk. Diperlukan dukungan lebih baik dari Pemerintah Daerah dan kolaborasi efektif dengan stakeholder eksternal untuk optimalisasi pembinaan usaha kecil olahan pangan di Kota Prabumulih.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2020). Dampak pandemi Covid-19 bagi UMKM serta strategi e-marketing UMKM di Indonesia.
- Dwiparma, A., Harahap, R. H., & Kusmanto, H. (2022). Penggunaan Media Sosial Sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Perspektif*, 11(4), 1511–1518. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.7479>
- Indonesia, B. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah.
- Isnaini, & Barus, U. M. (2015). PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SUMUT SYARIAH KOTA MEDAN. *Jurnal Mercatoria*, 8(2).
- Kusmanto, H., Suharyanto, A., Prayoga, Y., Purnamawati, I. G. A., & Nugraha, N. A. (2020). Understanding young political and comprehensive tax program in ASEAN. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(6), 1811–1814.
- Limbong, A. C. (2023). Penggunaan Metode Balanced Scorecard (BSC) untuk Pengukuran Kinerja pada UMKM XYZ. *Journal of Industrial and Manufacture Engineering*, 7(2), 217–223. <https://doi.org/10.31289/jime.v7i2.10026>
- Maulana, D. A., & Atmojo, M. E. (2023). as Empowerment of UMKM Pasca COVID-19 Pandemic. 12(2), 441–448.
- MELIANA, M. (2019). STRATEGI PEMASARAN USAHA KECIL MENENGAH GULA MERAH AREN DI KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Nugraha, D. S. (2022). Pemberdayaan Kelompok Penggerak Pariwisata di Kabupaten Sumedang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 304–313. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1202>
- Nur Syam, A. A., Sukmono, Y., & Pawitra, T. A. (2022). Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Proses Produksi Lemari dengan Metode Hazop pada UKM Rumahkayu Samarinda. *Journal of Industrial and Manufacture Engineering*, 6(2), 122–130. <https://doi.org/10.31289/jime.v6i2.7200>
- Nyxedanovya, Z., & Inayah, S. H. (2018). Merek Kolektif Sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kampung Batik Laweyan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pinayungan, J., & Isnaini, H. K. dan. (2018). Implementation of the Minister of Transportation Regulation of the Republic of Indonesia on Traffic Safety Standards and Road Transportation. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 8(1), 108–123.
- Polnaya, G. A., & Darwanto, D. (2015). Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing pada ukm ekonomi kreatif batik bakaran di pati, jawa tengah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 22(1).
- Pranata, J., Wijoyo, H., & Suharyanto, A. (2021). Local Wisdom Values in the Pujawali Tradition. 4, 590–596.
- Ramdani, D. F., & Febriasari, A. (2018). Model Kebijakan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Provinsi Banten. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 8(2), 192. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1900>



- RAZAK, A. N., & others. (2018). PERBANDINGAN PENGATURAN TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU DALAM 3 (TIGA) UNDANG-UNDANG, UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999, UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014.
- Samrah, A. T., Azis, M., Jusuf, E., Akbar, Z., Suharyanto, A., Tahir, S. Z. Bin, & Nasution, J. (2021). Analysis of the Behavior of Clean and Healthy Living Communities. Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Sao Paulo, Brazil.
- Saragih, E. E., Mustamam, & Mukidi. (2019). Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). Vol 2, No.(1).
- Sarjana, P., Ilmu, M., Publik, A., & Area, U. M. (2021). Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Analisa Strategi E-Marketing Dinas Koperasi Ukm Kota Medan Terhadap Ukm Binaan Di Tengah Pandemi Covid-19 Tahun E-Marketing Strategy Analysis Of Koperasi Department Medan City Ukm To Ukm Development. 3(1), 14–29. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.521>
- Sudaryanto, R., & Wijayanti, R. R. (2013). Strategi pemberdayaan UMKM menghadapi pasar bebas Asean. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Badan Kebijakan Fiskal. Kementerian Keuangan, Jakarta, 1–32.
- Suharyanto, A., Fernanda, F., Jamaludin, J., Hodriani, H., Wiflihani, W., Muhajir, A., & Lubis, Y. A. (2021). School Readiness in the New Normal Era of Online Teaching and Learning at Junior High School. Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Sao Paulo, Brazil.
- Sulistia, D. F., & Suparman, N. (2019). Peranan Pembinaan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Jawa Barat Dalam Memajukan Perkoperasian Di Daerah. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 7(2), 58–70.
- Syaiful, S. (2016). Strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai upaya meningkatkan daya saing. AKMEN Jurnal Ilmiah, 13(3).
- Tarigan, E. B., Husni, M., Nasution, T., & Dewi, R. (2019). Peranan Sekretaris Desa dalam Menunjang Kinerja Kepala Desa. PERSPEKTIF, 6(2), 64–74.